



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANGDA TAHUN 2018 – 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) Tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Bappelitbangda yang selanjutnya disingkat Renstra Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Bappelitbangda yang selanjutnya disingkat Renja Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA BAPPELITBANGDA

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Bappelitbangda dalam menyusun Renja Bappelitbangda dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Bappelitbangda disusun sebagai berikut:

- | | |
|----------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN; |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA; |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAPPELITBANGDA; |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN; |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN; |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; |
| BAB VIII | : PENUTUP. |

Pasal 4

Perubahan Renstra Bappelitbangda berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda wajib melaksanakan Renstra Bappelitbangda dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Kepala Bappelitbangda wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Bappelitbangda
- (2) Kepala Bappelitbangda menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024, Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Bappelitbangda Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 - 1 - 2022
BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 - 1 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,



AYANG SANJUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 60

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Bappelitbangda, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Bappeda harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Bappelitbangda dan Renja Bappelitbangda, Bappelitbangda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbangda dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Bappelitbangda /lintas Renstra Bappelitbangda, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Bappelitbangda memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Bappelitbangda yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 60

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

DAFTAR GAMBAR..... 4

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan..... 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 11

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 11

2.2 Sumber Daya BAPPEDA 12

2.3 Kinerja Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah 14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 17

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... 20

3.1 IDENTIFIKASI ISU – ISU STRATEGIS..... 20

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih..... 20

3.2 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Provinsi Jawa Timur 21

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 22

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 30

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 35

4.1 Tujuan dan Sasaran 35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 51

BAB. VIII PENUTUP..... 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pegawai PNS Menurut Pendidikan, Pangkat dan Eselon per Desember Tahun 2020 12

Tabel 2. 2 Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Tahun 2020..... 13

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan 13

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Gedung BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan 14

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 16

Tabel 3. 1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan 22

Tabel 3. 2 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan..... 26

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 36

Tabel 5. 1 Analisis SWOT 39

Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 42

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pasuruan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Alir Keterkaitan Renstra terhadap Dokumen 7

Gambar 1. 2 Bagan Alir Proses Penyusunan RENSTRA 7

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan fungsi penunjang urusan dalam penyelenggaraan kewenangan Kabupaten/Kota. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam perjalanannya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BAPPEDA diperlukan adanya **Review Renstra** dikarenakan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menjadi Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

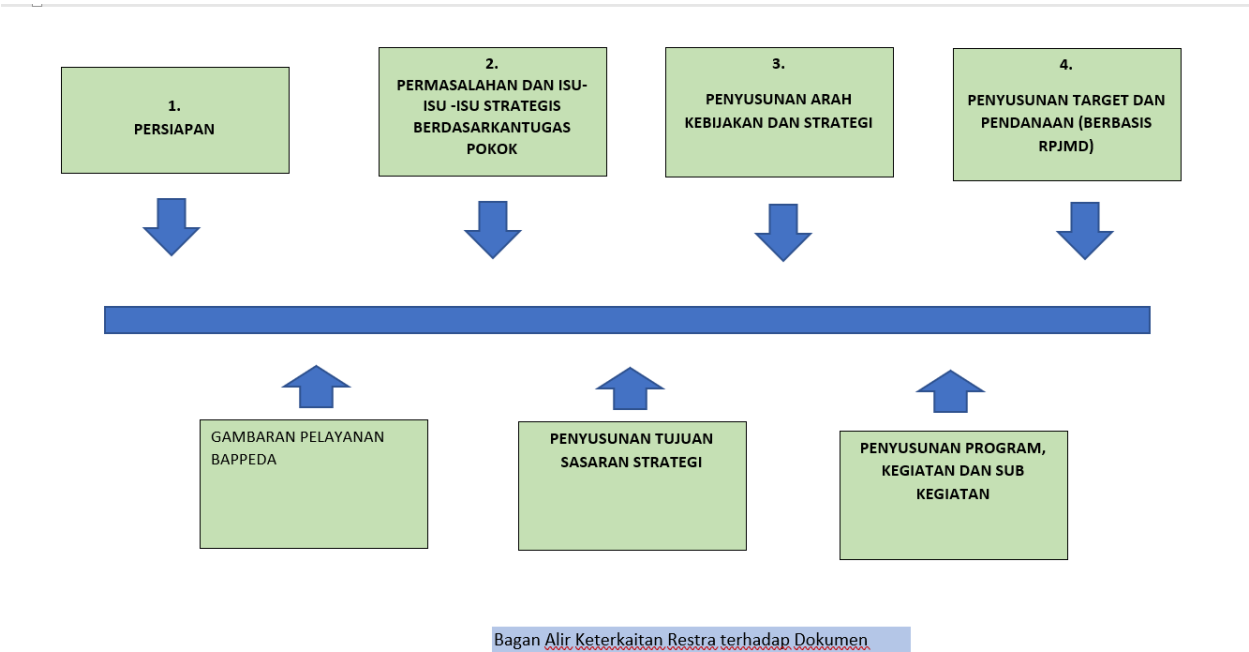
Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

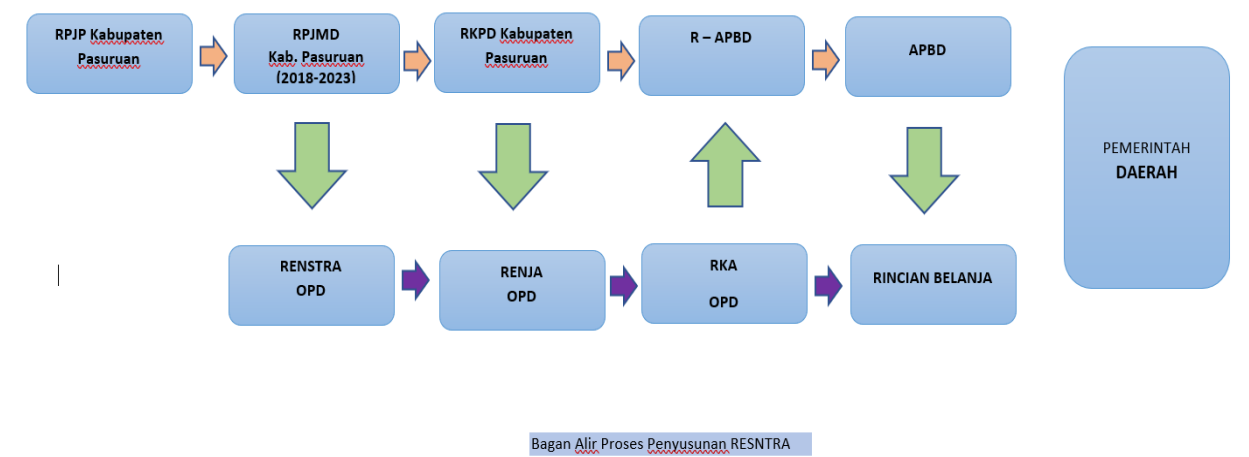
Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagai implementasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan disusun selaras dengan RENSTRA BAPPENAS dan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RENSTRA BAPPEDA juga telah memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut melalui program dan kegiatan dengan target yang terencana dan terukur. Penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA berdasarkan data dan informasi yang akurat akan meningkatkan akurasi perencanaan dan diiringi dengan konsistensi pelaksanaannya akan mendorong perbaikan kinerja perencanaan yang diamanatkan kepada BAPPELITBANGDA. Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan tantangan selama kurun waktu perencanaan dan penyusunannya telah mendapatkan penajaman program dan kegiatan oleh para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah. Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA inilah yang selanjutnya harus digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Perubahan RENJA yang bersifat tahunan selama lima tahun

dalam periode tersebut terutama dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 1.1 Bagan Alir Keterkaitan Renstra terhadap Dokumen



Gambar 1.2 Bagan Alir Proses Penyusunan RENSTRA

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah:

- 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
10. Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2024 adalah untuk menjaga konsistensi perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan

daerah (P RPJMD Kabupaten Pasuruan). Tercapainya target indikator kinerja sebagaimana tersebut pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan pada periode tersebut pada fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA menurut Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016.

Tujuan penyusunan RENSTRA BAPPEDA adalah :

- 1.1 Sebagai dasar acuan pencapaian target indikator kinerja selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam target tahunan dalam kurun waktu tersebut;
- 2.1 Menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BAPPELITBANGDA.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA

5.1 Strategi

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

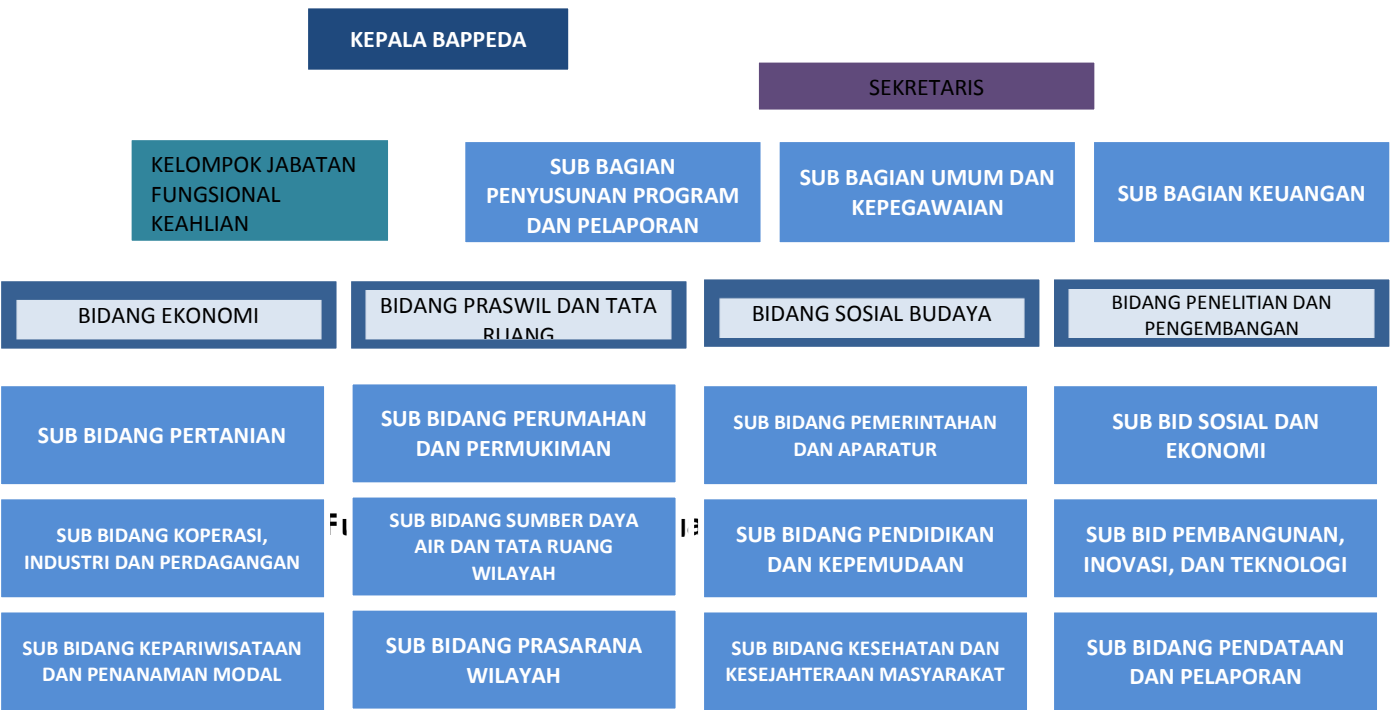
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan 2019

2.1 Tugas dan Fungsi

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Mempunyai. Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan *fungsinya*.

2.2 Sumber Daya BAPPEDA

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai meskipun masih perlu peningkatan.

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 sebanyak 52 pegawai terdiri dari pegawai PNS sebanyak 37 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 2 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 12 orang. Jumlah seluruh pegawai BAPPELITBANGDA dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.1
Pegawai PNS Menurut Pendidikan, Pangkat dan Eselon per Desember Tahun 2020

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S-3	1	Pembina Utama Muda	1	Eselon II b	1
S-2	9	Pembina Tk I	1	Eselon III a	1
S-1	19	Pembina	7	Eselon III b	4
D-3	-	Penata Tk I	7	Eselon IV a	15
D-2	-	Penata	9	Non eselon	13
D-1	-	Penata Muda Tk I	6	JFP	3
SMA/SMK	8	Penata Muda	2		
SMP	0	Pengatur Tk I	4		
		Pengatur	-		
		Pengatur Muda Tk I	-		
		Pengatur Muda	-		
Jumlah	37		37		37

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Kab. Pasuruan Tahun 2022

Tabel 2.2
Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Tahun 2020

No	Jabatan	Pendidikan								
		SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	PTT	-	-	-	-	-	2	-	-	2
2	THL	5	-	-	-	-	2	-	-	7
Jumlah		5	-	-	-	-	4	-	-	9

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Kab. Pasuruan Tahun 2022

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Kantor BAPPELITBANGDA terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci KM 9 Bangil-Pasuruan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan telah memiliki sarana dan prasarana penunjang Tupoksi sebagaimana tabel -tabel berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan Dinas (mobil)	11 unit
2	Kendaraan Dinas (sepeda motor)	24 unit
3	Komputer	48 unit
4	Laptop	36 unit
5	Netbook	5
6	Printer	61 unit
7	Plotter	1
8	Scanner	1 unit
9	UPS	26
10	Mesin Ketik Elektronik	3 unit
11	Meja Rapat	22 buah
12	Kursi Rapat	158 buah
13	Kursi Tamu	4 buah
14	Meja Tamu	1
15	Kursi Putar	2 buah
16	Meja Biro	5 bauh
17	Meja Komputer	12 buah
18	Sofa	4
19	Kursi Kerja	75
20	Meja Kerja	53 buah
21	Brankas	3 buah

No	Uraian	Jumlah
22	Kamera	10 unit
23	LCD Proyektor	9
24	Layar Proyektor	2
25	Microphone	1
26	Telepon	30 unit
27	Mesin Faksimile	4
28	Televisi	1
29	Kaset Recorder	1
30	Sound sistem	1 paket
31	Wireless	1
32	Handycam	5
33	GPS	5 unit
34	Air Conditioner	36 unit
35	Mesin Fotokopi	1 unit
36	Lemari Besi	13 buah
37	Rak Kayu	16 buah
38	Filling Besi/Metal	16 buah
39	Lemari Kaca	2 buah
40	Lemari Kayu	14 buah
41	Lemari Buku Perpustakaan	5 buah
42	Lemari Peta	1 buah
43	Papan Visuil	1 buah
44	Alat Penghancur Kertas	3 buah
45	Papan Pengumuman	14 buah
46	Mesin Absensi	1 buah
47	Papan Panel	1

Sumber: Data Inventaris Barang Tahun 2018

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Gedung BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kaban	1	Ruang
2	Ruang Sekretaris	1	Ruang
3	Ruang Bidang	4	Ruang
4	Ruang Rapat	2	Ruang
5	Ruang Gudang	2	Ruang
6	Ruang Fungsional	1	Ruang
6	Loby	1	Ruang
7	Musholla	1	Ruang
8	Dapur	1	Ruang
9	Toilet / Kamar Mandi	4	Ruang

Sumber : Bappeda Kabupaten Pasuruan, Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, yang menggambarkan kualitas birokrasi pemerintah. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik				84	88	91	93	100	85	89	-	-	-	101	101	-	-	-
2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan				-	-	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti				80	85	100	100	100	125	118	100	-	-	80	139	100	-	-
4	Nilai SAKIP OPD				75	81	83	84	85	76,43	81,48	83,48	-	-	98,129	100.937	100.547	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPELITBANGDA dengan merujuk kepada deskripsi Tupoksi, Sumber Daya BAPPELITBANGDA, dan Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pelayanan BAPPELITBANGDA lima tahun kedepan adalah :

Tantangan	Peluang
Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan	Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan formal
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah akibat adanya perubahan kebijakan	Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan
Sistem Informasi yang ada belum dikelola dengan baik	Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan BAPPELITBANGDA

- A. Adanya Persepsi Masyarakat Bahwa Pembangunan Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah. BAPPELITBANGDA mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah, yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan terkoordinasi secara modern dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Dalam fungsinya untuk menjembatani aspirasi masyarakat, maka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang dimaknai akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Akan tetapi, belum optimalnya peran masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan menyebabkan hasil-hasil pembangunan juga belum dapat dirasakan secara maksimal.

- B. Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan. Menghilangkan ego-sektoral antar bidang sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan sesuai tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA.
- C. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini, pada intinya adalah merupakan proses koordinasi, pengendalian dan penyeimbang setiap hubungan interaksi tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa format pemerintah adalah sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Penguatan aspek manajerial masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tercapainya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di tingkatan pelaksana.
- D. Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, hal ini disebabkan proses politis mempengaruhi dinamika perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

2.4.2 Peluang Pengembangan BAPPELITBANGDA

- A. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Meningkatnya peran serta stakeholder (masyarakat, perguruan tinggi dan

organisasi masyarakat) dalam proses perencanaan pembangunan dengan ikut serta memberikan saran, masukan dan usulan-usulan rencana pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

- B. Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan formal. BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan terus melakukan peningkatan kapasitas, baik itu kapasitas kelembagaan maupun kapasitas aparatur melalui pelaksanaan bimtek, diklat, dan pendidikan formal, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia yang ada.
- C. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan mendorong peningkatan kinerja, efisiensi waktu dan biaya, serta mempermudah proses dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan.
- D. Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan
- E. BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan akan terus mengupayakan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan. Upaya tersebut telah dirintis melalui adopsi teknologi perencanaan berbasis sistem informasi.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Identifikasi Isu – Isu Strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana yang mempengaruhi kualitas perencanaan.
2. Keterbatasan daerah dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat.
3. Penyusunan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial.
4. Perubahan kebijakan nasional yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD.
5. Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu.
6. Implementasi dokumen perencanaan dan hasil kajian/litbang belum optimal.

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan mendukung terwujudnya visi Bupati Pasuruan tahun 2018-2023 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”, dan mendukung misi bupati ke 4 yaitu Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Misi tersebut diwujudkan dengan tujuan Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif. Bappeda mendukung pada sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP.

3.2 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Provinsi Jawa Timur

1. Telaah Renstra Kementrian PPN/BAPPENAS

Visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui tujuan dan pelaksanaan program dan kegiatan mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi RPJMN Tahun 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, oleh karena itu, visi kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah : "Mewujudkan kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka :
 - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang;
2. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

2. Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bappeda Propinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi : "Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif dan Bertanggungjawab". Untuk itu, Bappeda Propinsi Jawa Timur menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- b. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif;
- c. Melakukan pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Visi penataan ruang wilayah adalah terwujudnya penataan tuang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Adapun misi-misi penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan adalah:

- a. Mengoptimalkan instrumen-instrumen yang berada dalam sistem penataan ruang guna terwujudnya tujuan penataan ruang;
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterahkan masyarakat;
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

Tabel 3.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KAWASAN PERDESAAN PPd (Pusat Pelayanan desa) ;	1. Perwujudan Pusat Kegiatan Perdesaan 1.1. Pengembangan kawasan perdesaan	<i>-updating dan penyiapan data pendukung perenc. pembangunan daerah yg lebih baik dan terencana.</i>	semua Desa/Kel. di Wilayah Kab. Pasuruan

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pusat Pelayanan Perdesaan sudah terbentuk pd masing-masing desa tetapi yg belum adalah linkage-nya (sistem)	sesuai potensi masing-masing kawasan a. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agrowisata & minapolitan pd wilayah Pasuruan; b. Peningkatan pertanian khususnya pd wil. Pasuruan Timur & Selatan; serta c. Pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian	-Dibutuhkan Perenc. Tata Ruang yg lebih rinci/detail sebagai pendetailan dr RTRW untuk Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kecamatan se Kabupaten Pasuruan -Dibutuhkan suatu Dokumen Perencanaan yg lebih spesifik ke arah pengembangan kawasan perdesaan (pertanian, agropolitan, minapolitan)	
	KAWASAN PERKOTAAN PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Perkotaan Bangil	1. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan		
	PKLp Pandaan PPK Gempol, Tutar	a. Pengembangan perkotaan utama di Kab. Pasuruan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Kegiatan Lokal promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); b. Mendorong & mempersiapkan perkotaan Bangil sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan perkotaan Pandaan sebagai pusat perdagangan dan jasa; serta c. Mendorong pengembangan perkotaan Rembang sebagai perkotaan dengan fungsi utama perindustrian.	-Dibutuhkan suatu Dokumen Perencanaan yg lebih spesifik ke arah pengembangan kawasan perkotaan (ibukota kabupaten, PKLp dan PPK)	# PKL Bangil (Kota Bangil) # PKLp terdiri atas:Perkotaan Pandaan, Purwosari, Pasrepan, Grati, dan Perkotaan Gondang wetan, # PPK adalah Ibukota Kecamatan Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejos, Wonorejo, Kejay, Purwodadi, Tutar, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang;
		3.2. Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi di Kabupaten Pasuruan		
		4. Penetapan fungsi kawasan Kawasan Perdesaaan 3.1. Pengembangan produk unggulan perdesaan : 3.2. Pengembangan kawasan lahan abadi pertanian pangan 3.3. Pengembangan agrowisata pada kawasan potensial		PPK Kec. di Kab. Pasuruan Kec. Prigen, Tosari, Tutar,&Rejos

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3.4. Pengembangan sistem agropolitan pada kawasan potensial		Kec. Tuter, Purwodadi, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo
		3.5. Pengembangan sistem minapolitan pada kawasan potensial		Kec. Tuter, Pasrepan, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo, Purwodadi, Kec. di wil. Pesisir KabPas (Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok & Nguling), Kec. Grati, Gempol, Pandaan, Beji, Pasrepan
		Kawasan Perkotaan		
		3.6 Pengembangan kawasan perkotaan utama di Kabupaten Pasuruan		Perkotaan (PKL / PKLp)
		3.7. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi sesuai sistem perkotaan dengan peran masing-masing		
		a. Penetapan ibukota Kabupaten Pasuruan		Perkotaan Bangil
		b. Penetapan pusat perdagangan/jasa;		Perkotaan Pandaan
		c. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi melalui pengembangan industri;		Perkotaan Gempol dan Rembang
		d. Pengembangan pusat pelayanan wisata; serta		Perkotaan Pandaan, Purwosari & Grati
		e. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi pendukung pertanian.		
A.4.		Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah		
		4.1. Transportasi		
		1. Transportasi Darat		
		a. Pengemb. prasarana jaringan jalan guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah:	- Dibutuhkan peny. RPIJM Bidang Infrastruktur maupun evaluasi/review	Kab. Pasuruan
		b. Pengembangan infrastruktur pendukung prasarana jaringan jalan:		Kec. Gempol
		1). Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal tipe A		
		2). terminal tipe C		
		2. Transportasi Laut		
		a. Peningkatan & pengemb. jalur internal		Kec. Bangil – Kec. Lekok.

No.	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Pengemb. jalan penghubung utama antar Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dg Kec. sekitarnya;		Kec. Lekok
		c. Optimalisasi pel. PPI dari segi ketersediaan sarana pendukung;		Kec. Lekok dan Kec. Nguling
		d. Optimalisasi pengembangan PPI dari segi sosial ekonomi		Kec. Lekok dan Kec. Nguling
		4.2. Prasarana Telematika a. Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama		Menyebar pada seluruh Kecamatan di kabupaten Pasuruan
		b. Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS c. Penyediaan sistem regulasi perencanaan & pengaturan (penataan ruang udara)		
		4.3. Prasarana Lingkungan a. Pengembangan TPA regional 4.4. Prasarana Energi/listrik 4.5. Prasarana Pengairan		Kec. Beji, Beberapa wil. kec. di Kab.Pasuruan Wil. Kab. Pas. Wil. Kab. Pasuruan
		a. Pemb. bang. Bendung (dam, cek dam, embung) & peningk. bang. Bendung yg sudah ada sbg bang. pengisi/penyimpan air ketika kering dan/atau pengendali luapan air ketika banjir b. Penanaman pohon pencegah longsor c. Pemb. dan perbaikan pintu air		Kec. Purwosari, Kec. Lekok, Kec. Bangil, Kec. Pandaan, Kec. Kraton, dan Wil. Kab. Pasuruan lain Wil. Kab. Pasuruan Wil. Kab. Pasuruan

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029, Bappeda Kabupaten Pasuruan; Hasil Analisa

Tabel 3. 2
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perwujudan Kaw.Lindung				
	1.1. Hutan Lindung	Hutan Lindung (milik negara); Hutan Rakyat (milik masyarakat); kawasan permukiman	a. Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air b. Memelihara habitat dan keaslian ekosistem	- Peningkatan Koordinasi (perenc & pengendalian) lintas OPD untuk Perenc Pemb. Bid. Ekonomi, Perenc. pengembangan infrastruktur, Kerawanan Bencana, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perenc. Pemb. Bid. Sosbud - Peny. Renc. Rinci Tata Ruang (RDTR) sbg penjabaran RTRW Kab. Pasuruan, serta merupakan pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang/lahan di Wil. Kab. Pasuruan	Kec. Tutur, Puspo, Tosari, dan Lumbang, Prigen, Gempol, Purwodadi
	1.2. Kaw. pantai berhutan bakau (mangrove)	Kawasan pantai bakau (mangrove)			Sepanjang pantai utara Pasuruan
	1.3. Kaw. Taman Nasional	Kaw. Taman Nasional	Perlindungan Taman Nasional Bromo - Tengger - Semeru		Kec. Tutur, Puspo, Tosari, dan Lumbang
	1.4. Kaw. Taman Hutan Raya	Kaw. Taman Hutan Raya (TAHURA) R. SOERJA	Perlindungan Taman Hutan Raya R. Soeryo		Kec. Prigen, Purwodadi, Prigen dan Purwosari
	1.5. Kaw. Taman Wsata Alam (TWA)	Kaw. Taman Wsata Alam (TWA) : TWA TRETES & TWA G. BAUNG	Perlindungan wisata alam: 1). TWA Tretes 2). TWA G. Baung		Kec. Prigen, Purwodadi
	1.6. a. Kaw. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kaw. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan masih belum ada pengembangan kawasan-kawasan baru selain yg telah ada & berkembang	a. Perlindungan Cagar budaya	Diperlukan perencanaan makro yg lebih spesifik untuk mendukung optimalisasi perencanaan pembangunan & wilayah (spasial) Dibutuhkan Masterplan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, RIPPDA (Pariwisata), Industri, Koperasi, Pondok Pesantren,	Kec. Gempol, Kec. Pandaan Kec. Purwosari, Kec. Purwodadi, Kec. Prigen, Kec. Winongan, Kec. Rejosari, Kec. Pandaan, Kec. Tosari
	b. Kaw. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan:	b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: 1) Kaw. Kebun Raya Purwodadi	b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: 1) Kawasan Kebun Raya Purwodadi		Kec. Purwosari dan Kec. Purwodadi

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.7. Kaw. Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Alam	a. Kawasan rawan bencana banjir b. Kawasan rawan bencana alam lainnya		Kec. Gempol; Kec. Beji; Kec. Rembang; Bangil; Kraton; Grati; Pohjentrek; Gondangwetan; Rejoso; Winongan; serta Lekok
	1.8. Kaw. Lindung Geologi	Kawasan Lindung Geologi	a. Konservasi kaw. rawan bencana alam letusan gunung berapi: 1)G. Bromo; 2)G.Welirang b. Kaw. rawan bencana gempa bumi dan longsor c. Kaw. rawan bencana alam lainnya: 1). Kaw. pengungsian satwa meliputi: Pengungsian satwa Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru		Kec. Tosari, Prigen dan Purwosari. (Kec. Tutar; Puspo; Tosari; Lumbang; Prigen Kec. Tutar, Kec. Tosari, Kec. Puspo, dan Kec. Lumbang.
	1.9. Kaw. Lindung Lainnya	Kawasan Lindung Lainnya	2). Kaw. Imbuan Air Tanah Kawasan yang terletak di Peg.Arjuna-Welirang & Peg. Bromo d. Kaw. sempadan Sumber Mata Air		Kec. Tosari, Tutar, Puspo, Lumbang, Purwodadi, Purwosari, Prigen dan Gempol Mata air Umbulan dan Sumber Mata Air Banyu Biru di Kec. Winongan
B.2	Perwujudan Kaw. Budidaya				
	2.1. Renc. Peruntukan Kaw. H.Pro-duksi	Kaw. Hutan Produksi (milik negara); Kaw. Hutan Rakyat (milik masy dg fungsi hutan produksi/konservasi);	2.1. Pengemb. hutan produksi bernilai ekonomi tinggi dengan fungsi lindung diantaranya dengan reboisasi tanaman untuk menahan tanah		Kec. Gempol, Purwodadi, Purwosari, Prigen, Tutar, Puspo, Tosari, Pasrepan, Kec. Lumbang, Kec. Kejayan, Kec. Nguling, Kec. Grati, Kec. Winongan
	2.2. Renc. Peruntukan Kaw. Pertanian	Kaw. Pertanian lahan basah (sawah); Kawasan Pertanian Lahan kering, kawasan hortikultura, kawasan terbangun (permukiman/perumahan, fasilitas, perdagangan, industri, peternakan, dsbnya)	2.2. Pengemb. Kaw. pertanian a. Pengemb. Kaw. lahan pertanian basah b. Pengemb. kaw. lahan pertanian kering c. Pengemb. Kaw. holtikultura		Kec. Nguling, Grati, Winongan, Lekok, Rejoso, Gondangwetan, Kejayan, Pohjentrek, Wonorejo, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Pandaan, Prigen, Gempol, Beji, Bangil, Rembang dan Kec. Kraton pengembangan kawasan tegalan/ladang dan sawah tadah hujan yang tersebar di Kab. Pas. Kec. Tutar, Tosari, Lumbang, Pasrepan dan Kec. Pandaan

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.3. Renc. Peruntukan Kaw. Perkebunan		2.3 Pengembangan Kaw. Perkebunan		Kec. Pasrepan & Kec. Kejayan
	2.4. Renc. Peruntukan Kaw. Perikanan		2.4. Pengembangan kawasan perikanan		menyebar di hampir semua Kec. yang ada di Kab. Pas.
	2.5. Rencana Peruntukan Kawasan Peternakan		2.5. Pengembangan Kawasan Peternakan		menyebar di hampir semua Kec. yang ada di Kabupaten Pasuruan
	2.6. Rencana Peruntukan Kaw. Pertambangan		2.6. Pengembangan Kawasan Pertambangan		menyebar secara proporsional & terbatas di beberapa kec. di Kab. Pas. sesuai sebaran potensi & kendala yg ada. Kab. Pas.
	2.7. Rencana Peruntukan Kaw. Peruntukan industri		2.7. Pengembangan Kaw. peruntukan industri		
	2.8. Renc. Kaw. tujuan pariwisata & daya tarik wisata		2.8. Pengemb. Kaw. tujuan pariwisata & daya tarik wisata		
	2.9. Renc. Kaw. permukiman		2.9. Pengembangan Kawasan permukiman		
	2.10. Renc. Kaw. perdagangan		2.10. Pengembangan Kawasan perdagangan		
C.	Rencana Kawasan Strategis		Perwujudan Kawasan Strategis Kab	- Peningkatan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Kajian & Dokumen perencanaan Ruang/Wilayah khususnya diprioritaskan untuk kaw strategis dan andalan	
	1.1. Kawasan Strategis Hankam	Kawasan militer (KSN)			
	1.2. Kawasan Strategis Ekonomi		1.2. Kawasan Strategis Ekonomi		
	a. Kaw. Industri & peruntukan industri ;	Kawasan Industri & peruntukan industri	a. Kawasan Industri & peruntukan industri ;		
	b. Kaw. sekitar interchange tol; c. Kaw. agropolitan; d. Kaw. minapolitan e. Kaw. airlangga city f. Kaw. pesisir	- -	b. Kawasan sekitar interchange tol; c. Kawasan agropolitan; d. Kawasan minapolitan e. Kawasan airlangga city f. Kawasan pesisir		
	1.3. Kaw. strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam &/atau teknologi tinggi :		1.3. Kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi :		
	a. kaw. pengemb. Stasiun	kawasan pengembangan Stasiun Pengamat	a. kawasan pengembangan Stasiun Pengamat		Desa Watukosek, Kecamatan Gempol

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengamat Dirgantara	Dirgantara (LAPAN)	Dirgantara		
	b. kaw. PLTGU Grati	kawasan PLTGU Grati (PT. INDONESIA POWER)	b. kawasan PLTGU Grati		Desa Wates, Kec. Lekok
	1.4. Kawasan sosio-budaya: 1.5. Penyelamatan lingkungan hidup:	Kawasan sosio-budaya:	1.4. Kawasan sosio-budaya: 1.5. Penyelamatan lingkungan hidup:		Kec. Tutur, Kec. Tosari, Kec. Puspo dan Kec. Lumbang
	Kaw Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru & Tahura R. Suryo;	Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Tahura R. Suryo;	Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Tahura R. Suryo;		

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029, Bappeda Kabupaten Pasuruan; Hasil Analisa

2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Kegiatan Rencana Pembangunan. Telaah KLHS dalam dokumen RENSTRA ini merupakan bagian dari KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Strategis adalah hal yang menunjukkan komitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari permasalahan-permasalahan yang ada dengan memperhatikan telaah kebijakan dari Pemerintah yang lebih tinggi dan dokumen terkait, maka dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis.

Masalah 1	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana yang mempengaruhi kualitas perencanaan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	1	10
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	2	30
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	2	20
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	2	30
	Total 1	100	13	240

Masalah 2	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Sistem e-planning masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam penerapannya masih diperlukan banyak	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	2	50
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	2	50

penyesuaian.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	2	30
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	3	30
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 2	100	13	205

Masalah 3	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Keterbatasan daerah dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	1	10
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 3	100	14	250

Masalah 4	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Penyusunan Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	3	30
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	2	30

	Total 4	100	17	285
Masalah 5	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Perubahan kebijakan nasional yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	3	30
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	1	25
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	1	10
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 5	100	12	200
Masalah 6	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai
Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	2	20
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	2	30
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	1	10
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 6	100	12	225
Masalah 7	Kriteria	Bobot	nilai (1-3)	Bobot x Nilai

Implementasi dokumen perencanaan dan hasil kajian/litbang belum optimal	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	1	10
	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	3	75
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25	3	75
	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	3	45
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10	2	20
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	1	15
	Total 7	100	13	240

Dari hasil penentuan isu strategis, maka yang menjadi prioritas untuk ditangani adalah :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial.
2. Keterbatasan daerah dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat.
3. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana yang mempengaruhi kualitas perencanaan.
4. Implementasi dokumen perencanaan dan hasil kajian/litbang belum optimal.
5. Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan dan belum tepat waktu.
6. Sistem *E-Planning* masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam penerapannya masih diperlukan banyak penyesuaian.
7. Perubahan kebijakan nasional yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD.

Dari hasil skoring tersebut maka diperoleh isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Pengembangan Sumber Daya Perencanaan

3. Belum sepenuhnya rekomendasi hasil perencanaan serta kelitbangan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan merujuk pada sasaran daerah yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR
			2018	PADA TAHUN KE -					2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan 1	Indikator Tujuan							
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Perencanaan	22,75	23,00	23,62	24,50	25	25,50	25,50
		Nilai SAKIP Pengukuran	19,31	19,68	19,97	21	21,50	22	22
1.1	Sasaran 1	Indikator Sasaran							
	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	N/A	84 %	88 %	91 %	96 %	100 %	100 %
		(sesuai regulasi; keselarasan dok perencanaan rpjmd-renstra, rpjmd- rkpd, renstra-renja, rkpd-renja, rkpd-kua ppas; partisipatif)							
		1. sesuai permendagri 86/2017 (sistematika RENSTRA dan RENJA) 10%							
		2. keselarasan dok perencanaan RENSTRA - RPJMD (Tujuan, Indikator Tujuan, Program, Indikator Program dan Target Kinerja) 20%							

		3. keselarasan dok perencanaan RENSTRA -RENJA (Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja) 15%							
		4. keselarasan dok perencanaan RKPD - RENJA (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif) 20%							
		5. keselarasan RENJA OPD - Berita Acara MUSRENBANG RKPD (Program, Kegiatan dan Lokasi) 10%							
		6. keselarasan Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja) dengan Dokumen Perencanaan Sektoral 5%							
		7.							
		Catatan Khusus : Untuk Perangkat Daerah kategori Baik (80% - 100%), dibawah 80% dikategorikan Tidak Baik							
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
		8. Ketepatan Waktu							
		9. Kesesuaian dengan tahapan penyusunan							
		10. Diacu oleh Perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan							

2.1	Sasaran 2	Indikator Sasaran							
	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	N/A	80 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		(Hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti / Akumulasi Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan mulai tahun 2018) * 100 %							
		Ditindak lanjuti : Dijadikan produk hukum/Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah/Ditindaklanjuti oleh penelitian dan pengembangan selanjutnya/Dilaporkan kepada Kepala Daerah							
3.1	Sasaran 3	Indikator Sasaran							
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76,30	81,48	83	84	85	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan, BAPPELITBANGDA melakukan analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 5. 1
Analisis SWOT

Internal		
Kekuatan (S) :	1. Kualifikasi SDM yang baik	2. Data dan informasi pembangunan relatif tersedia
Kelemahan (W) :	1. Belum sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.	1. Koordinasi antar bidang belum optimal.
Eksternal		
Peluang (O) :	1. Turut serta dalam pengembangan aplikasi perencanaan secara elektronik berbasis web.	1. Mengajukan rancangan peraturan Bupati untuk perubahan organisasi pada fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
1. Proses pengembangan aplikasi e-planning	2. Menyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk menghasilkan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.	2. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan bagi pegawai dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Tantangan (T) : 1. Hasil rekomendasi belum ditindaklanjuti. 2. Masih rendahnya kapasitas keilmuan perencanaan dari para pemangku kepentingan. 3. Tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan, dan integratif	1. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target. 2. Melakukan peningkatan kapasitas perencanaan pemangku kepentingan. 3. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan.	1. Melakukan sosialisasi dan diskusi hasil perencanaan serta penelitian dan pengembangan. 2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara SKPD. 3. Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui diklat penunjang jabatan fungsional. 4. Membangun kerjasama dengan kementerian, Lembaga, Perangkat daerah dan perguruan tinggi dalam rangka perluasan dan intensifikasi jaringan penelitian.
---	---	--

Hasil analisis SWOT menghasilkan strategi yang dijelaskan sebagai berikut:

Strategi S-O :

1. Turut serta dalam pengembangan aplikasi perencanaan secara elektronik berbasis web.
2. Menyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk menghasilkan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.

Strategi S-T :

1. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target.
2. Melakukan peningkatan kapasitas perencanaan pemangku kepentingan.
3. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan.

Strategi W-O :

1. Mengajukan rancangan peraturan Bupati untuk perubahan organisasi pada fungsi

penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

2. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan bagi pegawai dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Strategi W-T :

1. Melakukan sosialisasi dan diskusi hasil perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara SKPD.
3. Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui diklat penunjang jabatan fungsional.
4. Membangun kerjasama dengan kementerian, Lembaga, Perangkat daerah dan perguruan tinggi dalam rangka perluasan dan intensifikasi jaringan penelitian.

Tabel 5. 2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Lebih Sejahtera dan Maslahat.			
MISI 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan responsif. MISI 2. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren. MISI 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. MISI 4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. MISI 5. Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tenteram, religius, harmonis, dan berkebudayaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan daerah yang efektif	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis pada good governance.	1. Memperbaiki kinerja birokrasi dan mematuhi regulasi guna mewujudkan prinsip-prinsip good governance. 2. Mengembangkan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi. 3. Menyusun dan mengembangkan SOP serta mengoptimalkan pemanfaatan IT. 4. Mengelola tata laksana pemerintah secara efektif dan efisien.
	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan daerah	Peningkatan daya saing sumberdaya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.	1. Meningkatkan partisipasi sekolah dan angka melek huruf. 2. Meningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar. 3. Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan formal. 4. Mengembangkan pendidikan kewirausahaan dalam pondok pesantren. 5. Meningkatkan kuantitas perpustakaan dan minat baca masyarakat.
		Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. 2. Meningkatkan mutu kesehatan dasar. 3. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat. 4. Memperbaiki sistem jaminan kesehatan masyarakat.

		Pembangunan ekonomi kerakyatan yang inovatif berbasis potensi dan sumberdaya lokal.	1. Menumbuh kembangkan pasar desa dan produk unggulan. 2. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal. 3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 4. Meningkatkan produktivitas pertanian. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM. 6. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif. 7. Memantapkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai.
		Peningkatan tatanan masyarakat yang partisipatif berbasis nilai-nilai budaya lokal dan kelestarian lingkungan.	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban lingkungan. 2. Meningkatkan penegakan hukum dan kewaspadaan keamanan dan ketertiban wilayah. 3. Meningkatkan forum komunikasi antar umat beragama. 4. Menumbuhkembangkan kebudayaan dan kearifan lokal serta pembangunan destinasi yang berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana.

Bappeda berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui proses Musrenbang. B BAPPELITBANGDA juga melaksanakan pengendalian dan pelaporan.

Pada awal tahun 2017 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip money follow function, namun menggunakan prinsip money follow problem. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah menyiapkan perencanaan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu holistik-tematik, integratif, dan spasial. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah melalui Bappeda juga akan menjamin terwujudnya money follow problem melalui penerapan kebijakan pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif melalui rumusan yang terkait dengan RPJMD program prioritas yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Secara garis besar struktur anggaran belanja daerah terpilah menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja tidak langsung meliputi : (a) belanja pegawai, (b) belanja bunga, (c) belanja hibah, (d) belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja langsung terdiri dari tiga komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang melekat pada setiap kegiatan sebagai implementasi atas program-program prioritas. Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Proyeksi persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas dapat dilihat pada tabel Rencana Program, dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1. Rencana Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDA Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Perangkat Daerah Bidang SDA
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BAPPELITBANGDA
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Terwujudnya perencanaan daerah yang efektif	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan		Indikator tujuan : Nilai SAKIP Perencanaan	Nilai SAKIP Perencanaan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	22.75	23		23.68											
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran	(Jumlah kegiatan yang target outputnya tercapai / Jumlah seluruh kegiatan) x 100%	100%	80%	1,795,544,600	100%	2,294,295,000										
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air, dan internet selama 12 bulan	Jumlah rekening yang terbayarkan x jumlah bulan yang terbayarkan	48 rekening-bulan	84 rekening-bulan	127,000,000	96 rekening-bulan	67,000,000										
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	Jumlah orang yang terbayaran x jumlah bulan yang terbayarkan	552 orang-bulan	360 orang-bulan	379,145,000	360 orang-bulan	379,145,000										
		Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	20 unit	20 unit	25,000,000												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli				20 unit	25,000,000										
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK	Jumlah jenis pembelian ATK x jumlah frekuensi pembelian	24 jenis-kali	46 jenis-kali	102,350,000	46 jenis-kali	82,350,000										
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan x jumlah frekuensi pencetakan dan penggandaan	56 jenis-kali	25 jenis-kali	75,049,600	25 jenis-kali	60,000,000										
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli	72 eksemplar	6 jenis	17,000,000	168 eksemplar	17,000,000										
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	90 kali	4700 orang	204,000,000	4700 orang	174,000,000										
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	685 orang,kali	45 laporan	636,000,000	45 laporan	576,000,000										
		Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak/THL	Jumlah tenaga kontrak/THL yang terbayarkan x jumlah bulan yang terbayarkan	28 orang-bulan	96 orang-bulan	180,000,000	140 orang-bulan	284,000,000										
		Pengelolaan dan Managemen Arsip	Jumlah panjang arsip yang dikelola	Jumlah panjang arsip yang dikelola	-	100 meter linier	50,000,000												
		Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan	-			63 orang	270,000,000										
		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	Renja, Renja Perubahan, Renstra, SAKIP	4 laporan			4 laporan	250,000,000										
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan	4 laporan														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24 unit			26 unit	57,030,000										
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yang diasuransikan	Jumlah barang yang diasuransikan	24 unit			6 unit	52,770,000										

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	(Jumlah sarpras dalam kondisi baik/ jumlah sarpras yang ada) x 100%	100%	75%	1,061,340,000	100%	1,000,340,000									
		Pengadaan peralatan kantor				15 unit	412,800,000											
		Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung / kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung / kantor	19 unit	-	-	15 unit	412,800,000									
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x jumlah frekuensi pemeliharaan	7.336 unit/liter	35 unit	437,000,000	35 unit/kali	406,540,000									
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor				83 unit-kali	106,000,000											
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/ Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x jumlah frekuensi pemeliharaan	83 unit-kali	-	-	83 unit-kali	106,000,000									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dan asuransi	Jumlah pajak dan asuransi kendaraan yang terbayarkan	24 unit,kali	26 unit,kali	105,540,000											
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor x jumlah frekuensi pemeliharaan	2 unit-kali	-	-	35 unit-kali	75,000,000									
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja		100%	100%	490,000,000											
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	18 orang	90,000,000											
		Bimtek Perencanaan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan	-	45 orang	400,000,000											
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja		n/a	100%	230,000,000											
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	renja, renja perubahan, renstra, SAKIP	4 laporan	4 dokumen	230,000,000											
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase kesesuaian penyusunan Dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan	(jumlah Dokumen perencanaan yang disusun/ jumlah Dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan) x 100%	100%	100%	3,005,657,700											
		Penetapan RPJMD	jumlah Perda RPJMD Tahun 2018-2023	jumlah Perda RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan	1 Perda	1 Perda	529,657,700											
		Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan perubahan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD tahun n dan perubahan RKPD tahun n-1	2 Dokumen	2 Dokumen	290,200,000											
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	670,000,000											
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil monev RKPD	Jumlah Dokumen hasil pelaporan	4 laporan	4 laporan	181,000,000											
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan	4 laporan	10 laporan	159,800,000											
		Penyusunan KUA-PPAS beserta dan KUA-P-PPAS-P	Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS-P	Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS-P		4 Dokumen	195,000,000											

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (outpnt)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Pengelolaan Sistim Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil pendataan (e-database)	Jumlah Dokumen hasil pendataan (e-database)	-	1 Dokumen	110,000,000												
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ Bipati	Jumlah dokumen LKPJ Bipati	100 buku	80 buku	415,000,000												
		Peningkatan kemampuan Teknis Aparatur Perencanaan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek perencanaan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek perencanaan		65 Orang	455,000,000												
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	> keselarasan Dokumen perencanaan RKPD - RPJMD (Program, Indikator dan Target Kinerja) > keselarasan Dokumen perencanaan KUA PPAS - RKPD (Program, Kegiatan dan Page Indikatif)	n/a			100%	2,889,706,900										
		Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan perubahan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD tahun n dan perubahan RKPD tahun n-1	2 Dokumen	-	-	3 Dokumen	350,000,000										
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang RKPD	2 Dokumen	-	-	75 buku	720,600,000										
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen hasil pelaporan	Jumlah Dokumen hasil pelaporan	80 buku	-	-	80 buku	420,000,000										
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaporan	Jumlah Dokumen hasil pelaporan	4 laporan	-	-	4 laporan	200,000,000										
		Pengelolaan Sistim Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil pendataan	Jumlah Dokumen hasil pendataan	-	-	-	1 Dokumen	120,000,000										
		Peningkatan kemampuan Teknis Aparatur Perencanaan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	-	-	-	65 Orang	254,106,900										
		Penyusunan RPJMD	Draft review RPJMD	Peraturan Daerah RPJMD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	400,000,000										
		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah Dokumen Berita Acara musrenbang RPJMD		1 Dokumen	-	-	-	-										
		Facilitasi KENDUREN MAS	Jumlah laporan hasil fasilitasi KENDUREN MAS	Jumlah laporan hasil fasilitasi KENDUREN MAS		1 laporan	-	4 laporan	230,000,000										
		Penyusunan KUA-PPAS beserta dan KUA-P PPAS-P	Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPASP				4 Dokumen	195,000,000										
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang ehonomi yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	> sesuai permenadgri 86/2017 (sistematisa RENSTRA dan RENJA) > keselarasan Dokumen perencanaan RENSTRA - RPJMD (Tujuan, Indikator Tujuan, Program, Indikator Program dan Target Kinerja) > keselarasan Dokumen perencanaan RENSTRA - RENJA (Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja) > keselarasan Dokumen perencanaan RKPD - RENJA (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Page Indikatif) > keselarasan RENJA OPD - Berita Acara MUSRENBANG RKPD (Program, Kegiatan dan Lokasi	n/a	89%	1,083,700,600	89%	1,314,147,000										
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pertanian	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pertanian	-	13 laporan	138,675,400	14 laporan	168,689,038										
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sektoral lingkup Subbidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sektoral lingkup Subbidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan yang sesuai ketentuan	-	3 laporan	278,935,000	10 laporan	313,303,050										

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan		-	-		-		-							
		Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawasan Wonorejo, Kejayan, Pohjentrek dan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2024	Jumlah dokumen perencanaan pada kawasan wonorejo, kejayan, pohjentrek dan kraton	Jumlah Dokumen perencanaan	-	3 laporan	242,209,000											
		Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kepariwisataan penanaman modal dan ketenagakerjaan	Jumlah dokumen perencanaan pada sektor lingkup sub bidang kepariwisataan, penanaman modal dan ketenagakerjaan yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan pada sektor lingkup sub bidang kepariwisataan, penanaman modal dan ketenagakerjaan yang sesuai ketentuan		8 Laporan	152,150,400	8 laporan	232,154,912									
		Penyusunan Rencana Aksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal di Kabupaten Pasuruan	Dokumen Rencana Aksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal di Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal di Kab. Pasuruan	-	3 laporan	241,730,800											
		Penyusunan perencanaan pembangunan sub bidang pariwisata, penanaman modal dan ketenagakerjaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan		-	-	4 Dokumen	300,000,000									
		Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian		-	-	4 Dokumen	300,000,000									
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	> sesuai permendagri 86/2017 (sistematika RENSTRA dan KENJA) > keselarasan Dokumen perencanaan RENSTRA - RPJMD (Tujuan, Indikator Tujuan, Program, Indikator Program dan Target Kinerja) > keselarasan Dokumen perencanaan RENSTRA - KENJA (Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja) > keselarasan Dokumen	n/a	83%	1,311,000,000	86%	1,361,000,000									
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	12 Laporan	12 laporan	382,000,000											
		Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat		-	-	12 Laporan	225,000,000									
		Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pendidikan dan kepemudaan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kepemudaan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kepemudaan		-	-	12 Laporan	150,000,000									
		Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan dan aparatur	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur		-	-	12 Laporan	271,000,000									
		Fasilitasi forum kabupaten sehat	Jumlah laporan hasil fasilitasi forum kabupaten sehat	Jumlah laporan hasil fasilitasi forum kabupaten sehat	6 laporan	12 laporan	193,000,000	12 laporan	195,000,000									
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sub bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen perencanaan	3 Dokumen	4 dokumen	227,000,000	1 dokumen	100,000,000									
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	Dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan	3 Dokumen	-	-	1 dokumen	100,000,000									

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah dokumen perencanaan PD lingkup sub bidang pemerintahan dan aparatur	Jumlah dokumen perencanaan PD lingkup sub bidang pemerintahan dan aparatur	3 Dokumen	3 dokumen	115,000,000	1 dokumne	70,000,000		/							
		Monitoring Evaluasi Pengendalian Bidang Sosial Budaya	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pengendalian bidang sosial budaya	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pengendalian bidang sosial budaya		12 Laporan	150,000,000											
		Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	Jumlah laporan hasil fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	Jumlah laporan hasil fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	6 laporan	14 laporan	244,000,000	12 laporan	250,000,000									
		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Perangkat daerah lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	Persentase Perangkat daerah lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik		100%	1,037,000,000											
		Koordinasi Peny. Kebijakan Pengembangan Praswil di Kab. Pas.	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang prasarana wilayah	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang prasarana wilayah		12 laporan	347,000,000											
		Penyusunan Database Perencanaan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun sub bidang prasarana wilayah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun sub bidang prasarana wilayah		1 Dokumen	440,000,000											
		Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang perumahan dan permukiman	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang perumahan dan permukiman		12 kali	250,000,000											
		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase kesuaian proses penyusunan Dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Persentase kesuaian proses penyusunan Dokumen perencanaan sesuai ketentuan	0	100%	1,008,000,000											
		Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang sumber daya air dan tata ruang wilayah	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang sumber daya air dan tata ruang wilayah		12 laporan	400,000,000											
		Penyusunan SIG Tematik dan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen peta tematik persetujuan substansi ranperda revisi RTRW disusun sub bidang prasrana wilayah	Jumlah dokumen peta tematik persetujuan substansi ranperda revisi RTRW disusun sub bidang prasrana wilayah		1 Dokumen	608,000,000											
		PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	> sesuai permendagri 86/2017 (sistematika KENSTRA dan RENJA) > keselarasan Dokumen perencanaan KENSTRA - RPJMD (Tujuan, Indikator Tujuan, Program, Indikator Program dan Target Kinerja) > keselarasan Dokumen perencanaan KENSTRA - RENJA (Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Is keselarasan Dokumen	n/a			71%	2,250,000,000									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun sub bidang perumahan dan permukiman	Jumlah dokumen yang disusun sub bidang perumahan dan permukiman		3 Dokumen	300,000,000											
		Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang perumahan dan permukiman	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang perumahan dan permukiman		24 laporan	300,000,000											
		Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah di Kab. Pas.	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang prasarana wilayah	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang prasrana wilayah		24 laporan	300,000,000											

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Koordinasi Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah di Kab. Pas.	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang prasrana wilayah	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang prasrana wilayah				4 laporan	350,000,000		/							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun sub bidang prasarana wilayah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun sub bidang prasarana wilayah				3 Dokumen	300,000,000									
		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah, SD Air dan Kebencanaan	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang sumber daya air dan tata ruang wilayah	Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang sumber daya air dan tata ruang wilayah				24 laporan	400,000,000									
		Evaluasi Pemetaan Spasial Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen evaluasi pemetaan spasial pengembangan wilayah	Jumlah Dokumen evaluasi pemetaan spasial pengembangan wilayah				1 Dokumen	300,000,000									
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan	(Jumlah kelitbangan tahun berjalan - Jumlah kelitbangan tahun dasar/2018) / Jumlah kelitbangan tahun dasar) x 100%	n/a	25%	2,445,000,000	25%	2,577,754,000									
		Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi, dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan		6 Dokumen	730,475,000											
		Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan		9 Dokumen	914,525,000											
		Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan				3 dokumen	569,000,000									
		Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan				2 dokumen	619,000,000									
		Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen hasil kelitbangan				4 dokumen	620,000,000									
		Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil FGD	Jumlah laporan hasil FGD		3 Laporan	800,000,000	3 laporan	769,754,000									
2021 - 2022																		
Terwujudnya perencanaan daerah yang efektif	Terwujudnya sistem pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indikator Program: Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan							100%	7,834,961,000	100%	7,591,832,173	100%	-			
		Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kendaraan yang diasuransikan pada Perangkat Daerah							100%	52,500,000	100%	42,000,000	100%	-			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan pada SKPD yang diasuransikan							6 Unit	52,500,000		42,000,000	6 Unit				
		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis								160,000,000	%	120,000,000					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis							360 Orang	160,000,000	20 orang	120,000,000	22 orang				
		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan							100%	5,211,640,000	100%	5,774,603,623	100%				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai dengan perikatan yang dibayarkan honorariumnya							134 Orang / Bulan	353,400,000	12 dok	393,358,496	144 org				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN						532 Orang / Bulan	4,858,240,000	518 org	5,218,105,127	532 org						

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat yang dibayarkan honorariumnya								/	12 dokumen	163,140,000	324 orang				
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum							100%	695,078,380		679,910,250	100%				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk kunjungan tamu							4700 Orang	56,320,000		15,007,850	10 laporan				
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola							50 m/Linier "	56,250,000		67,500,000	1 dok				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang-undangan							168 Eksemplar	14,195,200		9,410,000	15 dokumen				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian bahan logistik kantor							46 Jenis	58,447,900		66,444,200	12 paket				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan							25 Jenis	91,179,070		104,380,000	12 paket				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor							20 Unit	19,242,410		19,741,200	12 paket				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD							45 Laporan	399,443,800		397,427,000	45 Laporan				
		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemnujng Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah							100%	434,304,190		311,325,900	100%				
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi/ berkala gedung kantor dan bangunan lainnya							1 unit	42,120,000							
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/berkala peralatan gedung/kantoritas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya							83 Unit	78,144,330		284,895,900	83 unit				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional							35 Unit	285,172,360		26,430,000	19 unit				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disimpan dan pajaknya							26 Unit	28,867,500		93,119,300	19 unit				
		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Pemnujng Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah							100%	788,415,030		226,409,900	100%				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							1 unit	519,714,800		66,000,000	0				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor							20 Unit	268,700,230		160,409,900	21 Unit				
		Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemnujng Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pemnujng urusan pemerintahan daerah							100%	381,594,000		209,240,300	100%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran telpon, air dan internet							8 Rekening/bulan	150,846,000		165,740,300	96 rekening				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai yang menerima honorarium							408 Orang / Bulan	230,748,000		43,500,000	144 orang				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah							100%	111,429,400	228,342,201	228,342,200	100%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah							1 dokumen	38,573,800	82,809,600	82,809,600	4 dokumen (P Renstra, Renja, Renja-a-P,RenAksi)				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							2 dokumen	62,264,200	82,983,500	82,983,500	2 Dokumen (LKJIP, LapKoord)				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah							2 Dokumen	10,591,400	62,549,100	62,549,100	2 laporan (Sakip, Simoneva)				
		Program: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indikator Program: Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah							100%	2,271,500,000	100%	2,449,542,858	100%				
		Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan							100%	643,942,000		755,158,000	4 dokumen				
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan							6 Dokumen	643,942,000		755,158,000	4 dokumen				
		Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan							100%	694,000,000		663,400,000	4 dokumen				
		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian Peraturan							2 dokumen	694,000,000		663,400,000	4 dokumen				
		Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan							100%	598,179,200		619,497,100	4 dokumen				
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial							4 Dokumen	598,179,200		619,497,100	4 dokumen				
		Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi							100%	335,378,800		411,487,758	1 dok, 3 laporan				
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi							4 Dokumen	335,378,800		411,487,758	3 laporan				
		Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Program: Persentase perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai dokumen perencanaan yang baik							83%	3,051,307,300	100%	2,528,983,700					

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Indikator Program: Persentase perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai dokumen perencanaan yang baik							92.68%			98%						
		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Jumlah Hasil koordinasi, Asistensi dan Monev bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Jumlah Dokumen Sektoral							1. 16 dok 2. 3 dok	1,647,267,700	6 Dok, 12 Laporan	1,004,230,300	6 Dok, 12 Laporan dan 6 PD					
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur							3 Dokumen	250,000,000		63,232,000	5 laporan					
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							1 dokumen	33,330,350		25,998,400	2 laporan'					
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah bidang infrastruktur yang sesuai ketentuan (RPIJM Perkim dan RPIJM Transportasi)							2 Dokumen	199,840,000		179,420,300	5 laporan					
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang kewilayahan yang sesuai ketentuan (RTRW)							1 Dokumen	749,883,000		185,000,000	1 dokumen					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur							5 Dokumen	225,492,000		170,579,600	5 dokumen					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan							1 dokumen	65,004,800		165,000,000	2 dokumen					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan peragkat daerah bidang Infrastruktur							5 Laporan	60,226,950		125,000,000	5 laporan					
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan peragkat daerah bidang Kewilayahan							1 Laporan	63,490,600		90,000,000	2 laporan					
		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Hasil koordinasi, Asistensi dan Monev bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							61 dok	793,126,400		815,588,900						
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi perencanaan bidang pembangunan manusia							8 laporan	150,000,000		160023800	8 laporan					

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi perencanaan bidang pembangunan manusia							34 laporan	150,000,000		51,363,700	34 laporan				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik							8 Dokumen	251,022,200		257,192,200	8 Dokumen				
			Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia							24 laporan				24 laporan				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perangkat Daerah bidang Pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik							34 dok	161,264,800		197,429,800	34 dok				
			Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan							12 laporan				12 laporan				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia							16 lap	230,839,400		149,579,400	16 lap				
		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Jumlah Hasil koordinasi, Asistensi dan Monev bidang Perekonomian dan SDA 2. Jumlah Dokumen Sektoral							1. 20 dok 2. 1 dok	610,913,200	9 dok, 18 lap	709,164,500	9 dok, 18 lap				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan perencanaan PD bidang perekonomian							6 dok	17,299,800		98,457,000	4 laporan				
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan perencanaan pembangunan PD bidang SDA							3 Dokumen	5,760,000		75,000,000	4 laporan				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian (pariwisata)							1 Dokumen	262,174,700		250,000,000	6 Dokumen				
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan bidang SDA							1 Dokumen				0 4 Dokumen				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang perekonomian yang Baik							5 dokumen	167,774,500		92,719,700	6 Dokumen				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA yang Baik							3 dokumen	101,679,200		92,987,800	4 dokumen				
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil monev penyusunan perencanaan PD bidang Perekonomian							5 lap	47,515,000		50,000,000	4 Laporan				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												25,000,000	1 dok		
		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis														120,000,000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan												120,000,000	22 orang	120,000,000	
		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan												5,774,195,640	100%	5,774,195,640	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												393,358,496	144 org	393,358,496	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji &Tunjangan ASN												5,218,105,127	532 org	5,218,105,127	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												162,732,017	324 orang	162,732,017	
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum												683,478,746	100%	683,478,746	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu												15,007,850	10 laporan	15,007,850	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												67,500,000	1 dok	67,500,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan												9,757,250	15 dokumen	9,757,250	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												66,444,200	12 paket	66,444,200	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan												104,380,000	12 paket	104,380,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												22,962,446	12 paket	22,962,446	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												397,427,000	45 Laporan	397,427,000	
		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah												404,445,200	100%	404,445,200	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi												284,895,900	83 unit	284,895,900	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												26,430,000	19 unit	26,430,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertizinannya												93,119,300	19 unit	93,119,300	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah												150,000,000	100%	150,000,000	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												-	0	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												150,000,000	83 Unit	150,000,000	
		Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pemunjang urusan pemerintahan daerah												231,266,000	100%	231,266,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												165,746,000	96 laporan	165,746,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												65,520,000	12 laporan	65,520,000	
		Kegiatan: Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evalnasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah												262,459,100	100%	262,459,100	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												90,000,000	4 dokumen (p renstra, renja, renja-p,RenAksi)	90,000,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												25,000,000	2 Dokumen (RKA,RKA-p)	25,000,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												85,000,000	2 Dokumen (LKJIP, LapKoord)	85,000,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												62,459,100	2 laporan (sakip,simon eva)	62,459,100	
		Program: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indikator Program: Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah												2,436,771,200	100%	2,436,771,200	2,437,150,000
		Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan												625,200,000	4 dokumen	625,200,000	378,800
		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian Peraturan												625,200,000	4 dokumen	625,200,000	
		Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan												625,192,000	4 dokumen	625,192,000	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan												625,192,000	4 dokumen	625,192,000	
		Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan												613,179,200	4 dokumen	613,179,200	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial												613,179,200	4 dokumen	613,179,200	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Perekrutasaan dan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi												573,200,000	1 dok, 3 laporan	573,200,000	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi												238,200,000	1 dokumen	238,200,000	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi												335,000,000	3 laporan	335,000,000	
		Program: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Program: Persentase perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai dokumen perencanaan yang baik												2,550,000,000	100%	2,550,000,000	
			Indikator Program: Persentase perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai dokumen perencanaan yang baik													100%	-	
		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil koordinasi, Sinkronisasi dan Monev bidang Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dan monev												850,000,000	6 Dok, 12 Laporan dan 6 PD	850,000,000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur												75,000,000	0	75,000,000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan												75,000,000	0	75,000,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur												150,000,000	0	150,000,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan												150,000,000	0	150,000,000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												200,000,000	0	200,000,000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												100,000,000	0	100,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran_Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur												50,000,000	0	50,000,000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan												50,000,000	0	50,000,000	
		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil koordinasi, Sinkronisasi dan Monev bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Jumlah Perangkat Daerah bid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan asistensi dan Monev												850,000,000	48 dok, 96 laporan, 48 Perangkat Daerah	850,000,000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia												75,000,000	3 Dokumen	75,000,000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan												75,000,000	3 Dokumen	75,000,000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												200,000,000	96 Dokumen	200,000,000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												200,000,000	123 Dokumen	200,000,000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia												50,000,000	48 Laporan	50,000,000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan												50,000,000	41 Laporan	50,000,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan												100,000,000	41 Laporan	100,000,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia												100,000,000	7 Laporan	100,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil koordinasi, Sinkronisasi dan Monev bidang Perekonomian dan SDA 2. Jumlah Perangkat Daerah mendapatkan asistensi dan monev												850,000,000	9 dok, 18 lap, 9 Perangkat Daerah	850,000,000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian												100,000,000	36 Laporan	100,000,000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA												100,000,000	9 Dokumen	100,000,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian												150,000,000	3 Dokumen	150,000,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA												100,000,000	3 Dokumen	100,000,000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												150,000,000	18 Laporan	150,000,000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												150,000,000	12 Laporan	150,000,000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian												50,000,000	18 Laporan	50,000,000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA												50,000,000	9 Laporan	50,000,000	
		Program: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan, waktu , pelaksanaan dan torevaluasi												1,925,000,000	100%	1,925,000,000	
		Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah												250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah												100,000,000	3 Dokumen	100,000,000	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah kab/Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan Kabupaten Pasuruan												150,000,000	2 Dokumen	150,000,000	
		Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah												250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tajuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Perhitungan Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah												150,000,000	5 Dokumen	150,000,000	
		Koordinasi, Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten												100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	
		Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													100,000,000			
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumiah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola												100,000,000			
		Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah												1,325,000,000	2 dok, 59 BA, 250 usulan	1,325,000,000	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RRUPD/RPJMD/RKPD)												550,000,000	2 dokumen	550,000,000	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik												100,000,000	1 Berita Acara	100,000,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah												100,000,000	56 Berita Acara	100,000,000	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota												425,000,000	2 Berita Acara	425,000,000	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan												150,000,000	250 usulan	150,000,000	
															14,484,615,886		14,484,615,886	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Bappelitbangdada yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pasuruan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD/RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Nilai SAKIP	Skor	75,00 (BB)	79,00 (BB)	80,00 (BB)	81,00 (A)	85,00 (A)	89,00 (A)	89,00 (A)
1	Nilai SAKIP Perencanaan	Skor	22,75	23,62	24.02	24,42	24,82	25,42	25,42
2	Nilai SAKIP Pengukuran	Skor	19,31	19,68	19,97	21	21,50	22	22

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD/RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	N/A	84 %	88 %	91 %	96 %	100 %	100 %
4	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan	%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
5	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	N/A	80 %	85 %	100 %	100%	100 %	100%
6	Nilai SAKIP OPD	skor	N/A	75	81,48	83	84	85	85

BAB. VIII

PENUTUP

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur keberhasilan dan kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan serta menjadi pedoman bagi Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018 – 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan termasuk indikator-

indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 - 2018 yang akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

